BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Pembangunan Daerah didasarkan asas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dan situasi satuan wilayah yang bersangkutan.

Dengan demikian daerah tidak saja mengurus rumah tangganya sendiri tetapi juga menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Pusat di daerah. Tentu saja hal ini membuat beban yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah tidaklah ringan, dan untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut dibutuhkan sumber-sumber keuangan yang besar. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU

Pemda) dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU PKPD) menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Terhitung sejak 1 januari 2001 Otonomi Daerah secara efektif diberlakukan.

PAD menjadi andalan daerah dalam penyumbangan pendapatan daerah, pada sisi lain Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengembangkan dan menumbuhkan kemandirian daerah melalui peningkatan peran serta masyarakat. Sebagai pelaku ekonomi maupun sosial budaya, peran serta masyarakat menempati posisi tertinggi dan karena itu perlu senantiasa dilibatkan dalam mendukung upaya menumbuhkan kemandirian Daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah perlu untuk mengoptimalisasikan penghasilan asli daerahnya salah satunya pajak daerah guna menambah APBD yang digunakan untuk kepentingan masyarakat tanpa harus menggantungkan pada pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas ternyata masalah pendapatan penerimaan pajak daerah sebagai APDB perlu disinkronisasikan dengan Pajak Pusat sebagai APBN. Berdasarkan itu pula penulis mengemukakan masalah ini kedalam Laporan Kerja Praktek yang Berjudul " **TINJAUAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (DPPKAD)**

KABUPATEN CIAMIS PERIODE TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan adalah :

1. Mengetahui jenis-jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis.
2. Mengetahui rekapitulasi realisasi pendapatan perolehan pajak daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
3. Mengetahui kendala-kendala yang terjadi di lapangan terkait dengan penarikan pajak daerah dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab Ciamis dalam mengatasi kendala tersebut.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan pada laporan kerja praktek ini adalah :

1.3.1 Kegunaan Praktis

a. Bagi perusahaan

Mengetahui hasil kinerja kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Asset Daerah dalam melaksanakan tugasnya selama periode tahun 2006 samapi dengan tahun 2010.

1.3.2 Kegunaan Akademis

a. Bagi pengembangan ilmu manejemen khususnya manajemen keuangan sebagai referensi tentang jenis-jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas DPPKAD Kab. Ciamis.
b. Bagi penelitian lain, sebagai referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji dalam bidang yang sama.
c. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pembanding antara ilmu-ilmu menajemen dengan keadaan yang terjadi dilapangan sehingga dengan adanya pembanding tersebut akan dapat memajukan ilmu manajemen yang sudah ada untuk diterapkan pada dunia secara nyata.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek di sebuah Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis. Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis berlokasi di JL. Drs. H. Soejoed No. 14A Ciamis Tlp. (0265) 771032.

Dapat dilihat jadwal kegiatan kerja praktek pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

No	Uraian	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pengajuan Kerja Praktek						
2	Pelaksanaan Kerja Praktek						
3	Pengambilan Data						
4	Bimbingan Kerja Praktek						
5	Sidang Kerja Praktek						